

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN PANTI ASUHANRizky Dian Arifin¹, Binti Shofiatul Jannah², Mochammad Ilyas Junjungan³^{1,2,3}Program Studi Akuntansi
UIN Sunan Ampel SurabayaSurel: rizkydianarfn@gmail.com¹, binti.shofiatul@uinsa.ac.id²,
mij@uinsa.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to understand accountability and transparency in the financial management of orphanages. This study is a qualitative study with case study approach. The data analysis technique uses the analysis technique from Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of this study indicate that there are two forms of accountability and transparency in financial management carried out by orphanages, namely to fellow human beings and God. The orphanage has carried out accountability well in accordance with the standards set by Muhammadiyah and is responsible for it both to stakeholders and to God.

Keywords: Accountability; Financial Management; Orphanages; Transparency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan panti asuhan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh panti asuhan yaitu kepada sesama manusia dan Tuhan. Panti asuhan telah menjalankan akuntabilitas dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Muhammadiyah dan mempertanggungjawabkannya baik kepada *stakeholder* maupun pada Tuhan.

Kata kunci: Akuntabilitas; Pengelolaan Keuangan; Panti Asuhan; Transparansi

PENDAHULUAN

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh organisasi nonlaba adalah rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan (Aprilia *et al.*, 2023). Panti asuhan, misalnya, mengelola keuangan dari para donator. Namun, seringkali laporan keuangan belum disusun sesuai dengan ISAK 35 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 35) (Setiawati & Hafni, 2023). Akibatnya, laporan keuangan yang disajikan tidak memberikan gambaran jelas mengenai kondisi keuangan panti asuhan. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 memastikan bahwa informasi keuangan disajikan secara transparan. Selanjutnya, panti asuhan memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, panti asuhan memiliki cara tersendiri dalam mengelola keuangan.

Panti asuhan merupakan organisasi yang dekat dengan nilai-nilai keagamaan biasanya memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang kuat dalam mengelola keuangan dan operasional. Akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif spiritual memiliki makna yang lebih mendalam daripada sekadar kewajiban formal dalam pengelolaan organisasi. Penelitian Mennita & Soeherman (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas mengarah pada ibadah dan bukan hanya kepentingan duniawi. Bahkan, Gafur *et al.*, (2021) menegaskan bahwa akuntabilitas memuat nilai religi dan spiritual yang merupakan tanggung jawab pada Allah SWT. Akuntabilitas juga dapat disisipi nilai-nilai budaya, seperti budaya *siri'na pacce*, sehingga dapat menumbuhkan saling menghormati, rasa solidaritas, dan rasa empati. Selanjutnya, konsep transparansi perspektif lainnya dijelaskan oleh Siskawati *et al.*, (2016). Salah satunya adalah aspek kejujuran yang harus dijunjung tinggi oleh pengelola organisasi sebagai bentuk saling percaya dengan masyarakat.

Meski ada kemajuan dalam memahami pentingnya akuntabilitas dan transparansi di panti asuhan, penelitian dengan tema ini masih menghadapi berbagai kesenjangan. Utamanya, penelitian yang terbatas pada ISAK 35 sering kali hanya menekankan aspek pelaporan keuangan tanpa memperhatikan implementasi praktis dalam tata kelola panti asuhan (Aditiya, 2021; Nadir *et al.*, 2022; Nurdiwaty & Widiawati, 2022). ISAK 35 dirancang untuk membantu entitas nirlaba dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, namun penerapannya di panti asuhan sering kali kurang memadai. Berbeda dengan panti asuhan yang berada di bawah naungan yayasan besar seperti Muhammadiyah sering kali memiliki cara tersendiri dalam mengelola keuangan yang tidak selalu sesuai dengan ISAK 35. Hal ini bisa terjadi karena yayasan memiliki sistem tata kelola dan pedoman keuangan internal yang telah teruji dalam jangka waktu yang lama dan didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi tersebut. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan yang dilakukan lebih mengutamakan pendekatan yang sesuai dengan visi, misi, serta nilai-nilai yang dianut oleh yayasan, seperti keadilan sosial dan amanah, yang terkadang tidak secara langsung mengacu pada standar akuntansi formal seperti ISAK 35. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan panti asuhan.

TINJAUAN PUSTAKA

Panti asuhan sebagai organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya yang diterimanya. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi dua pilar utama yang menentukan kepercayaan donatur dan keberlanjutan operasional panti asuhan. Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan keuangan adalah kewajiban suatu entitas untuk menjelaskan, melaporkan, dan bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang diterimanya (Mardiasmo, 2021). Menurut Ebrahim (2003), akuntabilitas tidak hanya terkait dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga melibatkan transparansi dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan, seperti donatur, pemerintah, dan masyarakat. Dalam organisasi nirlaba seperti panti asuhan, akuntabilitas menjadi elemen penting karena sebagian besar sumber daya yang dikelola berasal dari donasi yang memerlukan pengelolaan yang transparan dan dapat dipercaya (Basri & Siti-Nabiha, 2010).

Berdasarkan sudut pandang akuntansi, akuntabilitas merupakan seluruh rangkaian proses akuntansi sehingga memperoleh hasil yang dapat diungkapkan dengan benar (Alfia & Kwarto, 2023; Febriyanti *et al.*, 2018). Hasil dari pengelolaan keuangan organisasi harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar pada masyarakat melalui laporan keuangan dengan memenuhi syarat ketentuan yang berlaku atau melalui laporan aktivitas lainnya. Selanjutnya pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pada Allah SWT dapat melalui pemenuhan hukum syariah dengan menjalankan amanah dan tercapainya kesejahteraan umat (Nasirwan, 2017).

Transparansi merupakan elemen kunci dalam mewujudkan akuntabilitas di panti asuhan. Transparansi keuangan berarti memberikan kebebasan kepada donatur dan pihak berkepentingan lainnya untuk mengakses informasi terkait pengelolaan dana, seperti laporan keuangan, rincian pengeluaran, dan bukti-bukti transaksi. Panti asuhan dapat meningkatkan transparansi dengan menyediakan laporan yang dapat diakses secara publik, baik melalui media sosial, website, atau melalui laporan yang dikirimkan secara langsung kepada donatur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan studi kasus. Paradigma interpretif digunakan karena memiliki tujuan riset memahami, memaknai, serta mengikuti jalannya suatu fenomena (Kamayanti, 2020). Untuk memahami lebih dalam dari apa yang diteliti, seorang peneliti akan memasuki dunia informan dengan melakukan interaksi secara berkelanjutan (Creswell, 2009). Lokasi penelitian di panti asuhan Muhammadiyah At-Taqwa putri Sambikerep. Alasan memilih lokasi ini adalah karena panti asuhan terus melakukan pembangunan gedung dan fasilitas sejak tahun 2019. Menariknya meskipun proses pembangunan tersebut dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, panti asuhan tetap mampu mendanai pembangunan tersebut sampai selesai. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik menjadikan panti asuhan Muhammadiyah At-Taqwa putri Sambikerep sebagai lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan penelitian. Informan penelitian ada dua yaitu Ibu "X" selaku kepala panti asuhan dan ibu "X" ini juga sebagai informan kunci. Ibu "X" memiliki pemahaman yang mendalam terkait topik penelitian ini. Selain itu, ibu "X" juga bersedia mengartikulasikan pemikiran dan pengalamannya dengan jelas dan mendalam terkait informasi yang kami butuhkan untuk penelitian. Informan selanjutnya adalah ibu "S" selaku donator panti asuhan. Kami telah menyiapkan daftar pertanyaan wawancara atau disebut dengan wawancara semi terstruktur yang digunakan untuk menggali informasi. Selama proses wawancara direkam menggunakan *smartphone* dan memerlukan waktu sekitar 60 menit untuk setiap informan. Terakhir, kami menulis transkrip hasil wawancara ke dalam *microsoft word*.

Analisis data merujuk pada Huberman & Miles (2002) yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, kami menggunakan triangulasi data. Metode yang digunakan dalam triangulasi penelitian ini adalah triangulasi metode, di mana akan dilakukan pencocokan dari hasil cara perolehan data yang satu dengan yang lain. Triangulasi metode digunakan karena dapat menambah kevalidan suatu penelitian. Kemudian untuk lebih menjamin kebenaran suatu informasi, maka hasil dari observasi dan wawancara kembali dikomunikasikan dengan informan. Informan mengoreksi informasi yang telah kami tulis setelah dilakukan wawancara. Penilaian atas konsultasi tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan atau kekeliruan saat kami memahami informasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Panti Asuhan

Panti asuhan memperoleh sumber dana dari para donatur yang memberikan dermanya tanpa adanya unsur paksaan. Dana yang diterima panti asuhan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional, seperti penyediaan makanan, pendidikan, perawatan kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan sehari-hari anak-anak asuh. Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk perawatan fasilitas, gaji staf, serta berbagai program pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di panti.

Donatur yang hendak menderma secara langsung mendatangi panti asuhan dan menemui kepala asrama. Kemudian kepala asrama menerima dan donatur mencatat di buku donatur atas barang derma, lalu kepala asrama memberikan kuitansi yang sesuai. Selanjutnya kepala asrama menginformasikan ke bendahara atas perolehan derma. Jika derma berupa uang, maka kepala asrama memberikan uang tersebut pada bendahara.

Panti asuhan Muhammadiyah At-Taqwa putri Sambikerep memiliki sumber dana yang berasal dari donatur tetap dan donatur tidak tetap. *Pertama*, donatur tetap merupakan donator yang rutin setiap bulan memberikan derma kepada panti asuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. PT Yamaha merupakan salah satu donatur tetap, di mana PT. Yamaha rutin menyalurkan sejumlah uang kepada panti asuhan. Selain itu, warga sekitar panti asuhan juga menjadi donatur tetap melalui sistem *door to door*. Sistem ini merupakan program penggalangan dana yang dilakukan oleh

pengurus panti asuhan. Panti asuhan memiliki dua orang pengurus dalam menjalankan sistem *door to door*. Pengurus panti tersebut menyusuri rumah ke rumah untuk mengumpulkan dana dari donatur tetap. Selanjutnya, warga memberikan jumlah uang secara sukarela setiap bulannya. Berikut adalah hasil wawancara kepada ibu "X" untuk memperkuat pernyataan tersebut.

"donatur tetap itu rutin, dalam arti ada *sih*, tapi terkadang bulan iki *tok* bulan depan *e lali*, tapi *e..* kita menggalang itu ada yang menggalang *sih door to door* itu ada. Jadi *e..* dari rumah ke rumah, mungkin sekarang seratus bulan depan lima puluh, mungkin bulan depannya *endak*, tapi bulan depannya nanti *anu*".

Sejalan dengan hasil wawancara Ibu "X", berikut :

"orang *sodaqah kan* juga ada titik jenuhnya".

"*ndak* harus *sodaqah* terus *ya enggak*. *Ya* pasti namanya perekonomian *kan* pasang surut, *ndak* bisa dipaksa juga. Walaupun orang ini biasa, biasa *sodaqah* tapi *kan ya* orang punya kebutuhan lain".

Kedua, donatur tidak tetap merupakan donatur yang memberikan dermanya secara tidak rutin atau hanya memberi di waktu-waktu tertentu. Donatur tidak tetap panti asuhan berasal dari banyak pihak, seperti donatur lama yang memberikan derma saat diingatkan kembali dan donatur yang memberikan derma melalui transfer tanpa konfirmasi ke pihak panti asuhan. Tidak selamanya para donator memberi dalam bentuk uang, namun dalam bentuk kebutuhan sehari-hari seperti sembako hingga keperluan sekolah seperti alat tulis. Khusus untuk sembako, kepala panti asuhan memberikan kewenangan untuk menjual sebagian sembako yang memiliki batas kadaluarsa dalam kurun waktu tertentu. Sembako yang menumpuk terlalu banyak maka akan menyebabkan kerusakan kualitas sehingga berujung pada ke-*mubazir-an*. Meskipun kepala panti memberikan kewenangan menjual sebagian sembako, ia tetap mendahulukan kesejahteraan anak asuh. Ibu panti asuhan akan mencatat pemasukan atas penjualan sembako, kemudian bendahara akan meng-*input* pemasukan tersebut saat menyusun laporan keuangan. Berikut adalah pernyataan Ibu "X" saat wawancara :

"*he.em* ini yang penjualan sembako *segini*".

Ibu "X" melanjutkan penjelasannya :

"*he.eh*, berasnya itu dikumpulkan nanti *nek wes nang nggone* gudang, tiap bulan ada yang beli *ya didol*"

Terjemahan :

"*iya*, itu berasnya dikumpulkan, jika sudah ada di gudang, tiap bulan ada yang beli *ya* dijual"

Dalam hal ini, panti asuhan tidak menjual sembako terus menerus. Ada waktu-waktu tertentu di mana kepala panti menghentikan sementara penjualan sembako.

"tapi kadang-kadang aku yang menyetop "jangan *buk, nggak* usah dijual ini mau hari raya" soalnya hari raya itu *mbak* kita ngasih ke ibuk *e* anak-anak, buat parcel".

Dalam hal perencanaan keuangan, panti asuhan Muhammadiyah At-Taqwa putri Sambikerep tidak memiliki perencanaan dana secara resmi dan tertulis. Salah satu alasannya karena adanya ketidakpastian perolehan dana tiap bulan yang diterima panti asuhan. Kepala panti asuhan memiliki aturan tersendiri terkait perencanaan keuangan, seperti, pengeluaran dengan sifat rutin yang tidak bisa dihindari tetap dikeluarkan. Akan tetapi, jika terdapat kondisi yang masih dapat dipertahankan maka sebisa mungkin ditekan. Berikut adalah pernyataan Ibu "X" saat wawancara :

"iya,, posisinya bukan kita menganggarkan *ya*. Memang harus keluar segitu biaya sekolah setiap bulan, *ya* bayar SPP *ya* kita harus bayar *sih*. Kalau makan *kan* istilahnya terkadang donatur juga ada *ngasih* makanan, jadi kita *nggak* bisa menganggarkan setiap hari segini *endak* bisa. Kalau memang posisinya hari Jum'at misalkan banyak makanan *ya* kita *nggak* masak."

Selanjutnya, pengeluaran panti asuhan harus mendapat izin dari kepala panti asuhan. Kepala panti beserta seluruh pengurus mengalokasikan dananya dengan memperhatikan tujuannya, yaitu kesejahteraan anak asuh. Misalnya, kepala asrama mengajukan permintaan pada kepala panti asuhan untuk melakukan pembayaran kegiatan di panti asuhan. Kemudian panti asuhan mempertimbangkan dengan segala aspek. Apabila permintaan diterima, maka kepala panti asuhan memberikan perintah kepada bendahara untuk mengeluarkan sejumlah uang. Sebaliknya, jika permintaan tidak diterima, maka kepala panti asuhan tidak memerintahkan bendahara untuk mengeluarkan uang dan meminta kepala asrama untuk mempertahankan kondisi yang ada dan mencari alternatif lain tanpa mengeluarkan dana yang banyak.

Kepala asrama mencatat setiap transaksi yang terjadi setiap hari pada buku khusus sesuai dengan standar yang telah disepakati. Ia mencatat dengan jelas mengenai asal dana dan alasan pengeluaran dana beserta jumlah nominalnya. Kepala asrama kemudian memberikan salinan pencatatan tersebut pada bendahara dan kepala panti jika sudah mencakup satu bulan. Bendahara panti asuhan mengolah transaksi dalam satu bulan tersebut hingga menjadi laporan keuangan. Di samping itu, kepala panti mengawasi jalannya pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh bendahara. Kemudian kepala panti memeriksa hasil laporan keuangan yang telah disusun, apabila belum memenuhi standar maka kepala panti akan mengolahnya kembali. Pemeriksaan tersebut menjadikan laporan keuangan lebih kredibel.

Muhammadiyah mengeluarkan standar dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga panti asuhan Muhammadiyah At-Taqwa putri Sambikerep menggunakan standar tersebut. Standar laporan keuangan tersebut menggunakan basis kas dan belum memenuhi standar ISAK 35 yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ibu "X" selaku kepala panti asuhan memberikan penjelasan atas standar laporan keuangan sebagai berikut.

"*Nggak* bisa seperti itu. Posisinya *e..* pihak Muhammadiyah itu punya, *yo* punya standar *sih*. Istilah *e* Muhammadiyah iku *yo mbikin* sama, jadi semua panti *sak* Surabaya punya Muhammadiyah itu sama, kisi-kisinya sama."

Dilanjutkan dengan pernyataan berikut,

"Ya gak sedetil kayak akuntansi se, arus kas gitu ndak ada, cuman ya jurnalnya pemasukan, pengeluaran, saldo sudah"

Akuntabilitas Sebagai Bentuk Amanah

Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putri Sambikerep meyakini akuntabilitas sebagai amanah yang harus dijalankan. Panti asuhan memiliki kewajiban untuk membimbing, mengasuh, dan mengantarkan anak didik menjadi kader Muhammadiyah dan Aisiyah yang berkualitas sesuai dengan visinya. Visi tersebut menjadi cita-cita yang selalu berusaha untuk diwujudkan, sehingga untuk mewujudkannya disusunlah berbagai program.

Kepala panti menyampaikan laporan keuangan dengan melapor kepada MPS dan PCM melalui rapat kinerja triwulanan dan tahunan. Rapat kinerja ini melibatkan seluruh pengurus internal panti asuhan bersama MPS dan PCM. Dalam rapat triwulanan, kepala panti memaparkan kondisi keuangan panti selama tiga bulan, mencakup pendapatan dan pengeluaran. Sementara itu, dalam rapat kerja tahunan, yang dikenal sebagai Rapat Kerja (RAKER), kepala panti menjelaskan kondisi keuangan selama setahun penuh, termasuk pendapatan, pengeluaran, serta perkembangan finansial. MPS dan PCM kemudian menilai hasilnya, mengevaluasi posisi keuangan panti, serta memberikan saran-saran untuk meningkatkan aspek keuangan panti. Kepala panti juga memberikan penjelasan terkait standar laporan keuangan yang digunakan.

"Kan gini ini anu ya, tiga bulan sekali kepala panti ini bertanggungjawab untuk apa ya, hasil kinerja tiga bulan harus dilaporkan ke atasan, laporan keuangan dikasihkan, terus aku menjelaskan tiga bulan pemasukan segini, pengeluaran segini. Kita anu mbak, laporan."

"Satu tahun e yo e.. ada RAKER, dalam arti RAKER, RAKER itu membahas mengevaluasi dari tahun kemarin "ini ini ini" gitu"

Kemudian beliau melanjutkan seperti ini:

"ya dievaluasinya itu hanya sebatas global ya, "kenapa" maksud e lek turun "kenapa turun, kamu harus bagaimana" gitu"

Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putri Sambikerep juga bertanggung jawab kepada donatur dan pihak-pihak terkait yang memerlukan laporan. Meskipun donatur memberikan sumbangan dengan penuh keikhlasan, mereka tetap berhak mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini berperan penting dalam menjaga kepercayaan donatur, yang memengaruhi kesediaan mereka untuk terus memberikan dukungan.

Ibu "S", salah satu donatur panti asuhan, memiliki prinsip ikhlas dalam memberikan sumbangan dan tidak memerlukan bukti transaksi atas dermanya. Kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan panti asuhan didasarkan pada pengamatannya terhadap perkembangan panti dari tahun ke tahun. Ibu "S" yakin bahwa

kemajuan yang terus-menerus di panti menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik. Keberhasilan panti asuhan dalam mengembangkan organisasinya menjadi salah satu faktor penting yang membangun kepercayaan para donatur seperti Ibu "S". Ibu "S" menceritakan prinsip dan kepercayaannya terhadap panti asuhan pada wawancara di mana,

"kalau saya *ya*, masalah kuitansi itu *nggak* perlu, *nggak*, saya *nggak* seberapa perlu bukti tapi yang penting saya naruh sana, saya ikhlas, diterima sama sana"

Dilanjutkan dengan pernyataan Ibu "S" mengenai hasil pertanggungjawaban panti asuhan dalam pengelolaan keuangan, di mana

"*nah*, saya, *iya* mungkin.. sudah bagus karena *e..* pantinya selalu berkembang, apalagi sekarang gedungnya sudah bagus, anaknya *ya* sudah tambah, anak panti"

Panti asuhan tidak hanya bertanggung jawab kepada donatur, tetapi juga kepada masyarakat sekitar. Bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat tidak dilakukan melalui laporan keuangan, melainkan dengan memberikan bantuan berupa makanan. Berdasarkan hasil rapat dan kesepakatan pengurus, panti asuhan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Pemberian makanan ini dimaksudkan agar panti asuhan dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan tetangga sekitar serta membangun hubungan yang baik. Hubungan yang baik ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap panti asuhan. Ibu "X" memberikan penjelasannya pada wawancara sebagai berikut,

"*ngasih* istilahnya apa *ya..* *iya ya* pasti dengan adanya panti, tetangga juga harus menikmati"

Selain melakukan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pengurus juga mendidik anak asuh untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Anak asuh yang telah lulus secara akademik memiliki kewajiban untuk mengabdikan sebagai bentuk "terimakasih" terhadap panti asuhan, anak asuh tersebut disebut dengan *masyrifah*. Pengabdian *masyrifah* menjadi salah satu bentuk akuntabilitas, di mana mereka mengalirkan ilmu yang selama ini mereka dapatkan. *Masyrifah* juga mengajarkan disiplin keuangan disamping persoalan akademik dan non akademik dalam kehidupan sehari-hari. Pengabdian *masyrifah* tersebut berimbas pada keuangan panti asuhan, dengan kata lain *masyrifah* juga menjadi kontrol pengendalian dalam hal keuangan sehari-hari.

Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu organisasi kepada pihak yang lebih tinggi. Dalam perspektif Islam, pertanggungjawaban bukan hanya ditujukan kepada pihak atau lembaga yang memiliki kedudukan lebih tinggi, namun juga kepada Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Mudassir ayat 38-39 yang menekankan jika setiap diri harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah menjadi tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, pengelola harus mempertanggungjawabkan hasil dari amanah yang telah dititipkan oleh para donatur.

Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putri Sambikerep menjalankan akuntabilitas secara vertikal, hal ini sejalan dengan Pondok Pesantren MIP (Gafur *et al.*, 2021) yang menjalankan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Pengurus Panti

Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putri Sambikerep memiliki prinsip *lillahita'ala*. Prinsip *lillahita'ala* menjadi syarat bagi calon pengurus dan karyawan untuk berkesempatan menjadi bagian dari panti asuhan. Kepala panti menyebutkan dalam wawancara jika tidak ada gaji, melainkan biaya untuk mengganti transport. Di samping itu, juga menyebutkan jika mayoritas pengurus memiliki prinsip *lillahita'ala* dan hanya ada dua orang yang menerima insentif. Realitasnya, dalam laporan keuangan panti asuhan periode Januari 2023, terdapat pengeluaran pada kas kecil dengan keterangan insentif yang diterima oleh beberapa pengurus. Kepala panti asuhan memberikan penjelasan mengenai prinsip tersebut sebagai berikut,

“Tapi mayoritas dari pengurus itu hanya dua orang *kok* yang diambil, selebihnya wes *lillahita'ala*. Tapi saya yang buat secara pembukuan *yo* input *nek* aku mesti ada yang keluar, masuk lagi *tetep* aku yang mengeluarkan tapi masuk lagi.”

Di sisi lain kepala panti juga menyatakan jika,

“Kalau orang yang sudah mentarget minta gaji ini, berarti orang *e ndak lillahita'ala*, bukan karena Allah dia masuk, beda *lo* gitu itu.”

Sehingga, kepala panti asuhan mengartikan *lillahita'ala* sebagai tidak mengharapkan imbalan sesuai keinginannya, di samping rasa ikhlas dalam menjalankan amanahnya.

Transparansi Sebagai Kepercayaan Donatur

Transparansi memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Keduanya tampak seperti satu kesatuan, dimana panti asuhan bertanggung jawab untuk menjalankan amanah dengan menyusun laporan keuangan, sehingga donatur dapat mengetahui kinerja pengurus dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap panti asuhan. Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putri Sambikerep menerapkan transparansi dengan memberikan akses kepada donatur untuk melihat laporan keuangan yang mereka kelola.

Transparansi adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat umum untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan panti asuhan. Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putri Sambikerep memberikan izin kepada donatur, calon donatur, dan masyarakat yang ingin melihat laporan keuangan panti asuhan. Akses ini merupakan wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan panti. Donatur dapat memeriksa laporan keuangan dengan datang langsung ke panti asuhan. Ibu “X” mengatakan dalam wawancaranya sebagai berikut :

“*ya* berhak *sih*, kalau dia memang, *kan* kita sudah siapkan. Kalau memang dia perlu, saya *sih nggak papa* kita tunjukkan *gitu lo*. Kita *open kok*, maksud *e nggak* disembunyikan, memang laporan ini transparan *ya* ini dan ada ini sudah di cek biasanya, donat.. opo *e.. anu* juga ada yang lain *kan* bisa dilihat dari sini. *Kan nek* rekening koran *kan* sudah kita dapat rekening koran *kan* bisa ditunjukkan “ini yang transfer lewat bank *segini*” *kan* kelihatan angkanya berapa”

Panti asuhan menerapkan transparansi dengan memberikan bukti transaksi berupa kuitansi kepada donatur yang telah menyumbang. Namun, tidak semua donatur

menerima kuitansi, terutama mereka yang mendonasikan melalui transfer tanpa mengonfirmasi kepada pihak panti, karena identitas mereka tidak dapat dikenali oleh panti. Hal yang sama berlaku bagi donatur yang memberikan sumbangan dengan penuh kepercayaan untuk melaksanakan amanah tanpa meminta bukti. Panti asuhan menyusun laporan keuangan yang mencakup rincian pengeluaran harian. Bendahara memasukkan rincian tersebut di bagian akhir laporan keuangan, yakni laporan kas kecil panti asuhan. Laporan kas kecil ini berfungsi sebagai bentuk transparansi pengeluaran harian panti selama satu bulan. Selain itu, rekening koran juga digunakan sebagai bukti transparansi terkait pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan secara *online*. Namun, rekening koran bersifat *private*, dimana bendahara mendapatkan salinan sebagai bukti transaksi. Ibu "X" menyampaikannya pada wawancara, sebagai berikut :

"iya, saya *simpen*, tapi posisinya *tetep* saya kirim ke bendahara".

Dilanjutkan dengan,

"saya minta ke bank, saya punya PDF *ya*, dia juga punya PDF nya".

Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putri Sambikerep memiliki akun media sosial seperti *YouTube* dan *Instagram*, yang digunakan untuk mempublikasikan kegiatan sehari-hari tanpa memuat laporan keuangan. Meskipun panti asuhan juga memiliki situs *web* yang berfungsi sebagai sarana publikasi, pengelolannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pengunduran diri pengelola bagian IT, sehingga situs *web* tersebut belum terurus dengan baik. Ibu "X" menyampaikannya pada wawancara, sebagai berikut :

"kita laporan keuangan nggak pernah di.., *ya* kita punya e.. *youtube*, punya apa *instagram*, tapi laporan keuangan *nggak* pernah kita, *nggak* pernah kita apa *ekspose sih*".

Kemudian berkaitan dengan *website* panti asuhan, Ibu "X" menyampaikan sebagai berikut :

"... karena aku *gak melok* (tidak ikut) mengelola".

Dilanjutkan dengan,

"*sing* mengelola sendiri, *iya*, cuman habis itu keluar akhir *e vakum*".

Dalam perspektif Islam, transparansi erat kaitannya dengan *shiddiq* atau kejujuran. Pengelola panti harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran dalam mengelola laporan keuangan, karena kejujuran adalah aspek yang berhubungan langsung dengan hubungan pribadi seseorang kepada Tuhan. Kepala panti tidak dapat menargetkan atau mengontrol kejujuran secara langsung, karena kejujuran merupakan hal yang tidak dapat dipaksakan atau diawasi sepenuhnya. Kepala panti menjelaskan bahwa ia tidak bisa memantau semua transaksi harian di panti secara intensif, sehingga rasa saling percaya kepada setiap pengurus menjadi hal yang sangat penting. Ibu "X" memberikan penjelasannya pada wawancara sebagai berikut :

“kejujuran iku wes urusan ambek seng kuoso mbak, aku nggak bisa”

Dilanjutkan dengan :

“tapi saya *nggak* bisa orang ini bilang jujur seratus persen, aku *nggak* bisa, karena posisinya kita tidak terjun, tidak duduk di meja selama dua puluh empat jam”

Transparansi dalam pengelolaan keuangan panti asuhan menghasilkan kepercayaan dari donatur dan masyarakat umum, karena panti asuhan dapat menunjukkan kinerja yang nyata. Meskipun donatur memberikan sumbangan dengan prinsip keikhlasan, mereka akan merasa lebih puas jika derma mereka bermanfaat. Akibatnya, hubungan baik antara panti asuhan, donatur, dan masyarakat akan terbentuk. Hubungan yang positif ini berkontribusi pada kesejahteraan kedua belah pihak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Siskawati *et al.*, (2016), di mana Masjid Jami' yang mengutamakan kejujuran mampu membangun kemakmuran.

SIMPULAN

Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putri Sambikerep telah melaksanakan akuntabilitas dengan baik. Panti asuhan tersebut bertanggung jawab kepada pihak yang lebih tinggi, yaitu PCM dan MPS, melalui agenda rapat triwulanan dan tahunan. Selain itu, panti asuhan juga melaporkan pengelolaan keuangannya kepada donatur melalui laporan keuangan. Para pengurus panti asuhan menjunjung tinggi prinsip *lillahita'ala* dalam menjalankan amanah mereka. Namun, Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putri Sambikerep belum sepenuhnya menerapkan transparansi. Mereka memberikan kuitansi kepada sebagian donatur, memperbolehkan akses untuk melihat laporan keuangan secara langsung, serta memiliki prinsip saling percaya dan kejujuran antara pengurus. Meskipun demikian, pengelolaan *website* panti asuhan sebagai media publikasi belum dilakukan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, R. (2021). Apakah Organisasi Nirlaba Telah Menerapkan PSAK No. 45 Secara Amanah? (Studi Kasus Pada LKSA Panti Asuhan Al-Isra). *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.37531/bijak.v2i2.3045>
- Alfia, Y. D., & Kwarto, F. (2023). Doxa Etik Kesenjangan Personalita Habitus Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.33795/jaeb.v12i2.5136>
- Aprilia, P. S., Fikri, M. A., & Suryantara, A. B. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Pulau Lombok. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 180–191. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.673>
- Basri, H., & Siti-Nabiha, A. K. (2010). *Views On The Issue Of Accountability In Non-Profit Organizations*. 14, 49–60.

- Creswell, J. (2009). *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Edisi Ketiga). Pustaka Pelajar.
- Ebrahim, A. (2003). Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs. *World Development*, 31(5), 813–829. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00014-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00014-7)
- Febriyanti, R. S., Dra. Yulinartati, A. K., & Fitriyah, E. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Criminal Responsibility Of Notary On Counterfeiting Authentic Deed. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.33795/jaeb.v7i2.345>
- Gafur, A., Abdullah, R., & Adawiyah, R. (2021). Akuntabilitas Berbasis Amanah Pada Pondok Pesantren. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.06>
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The Qualitative Researcher's Companion*. Sage Publications, Inc. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-qualitative-researchers-companion/book7103>
- Kamayanti, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan [edisi revisi]*. Peneleh.
- Mardiasmo, M. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mennita, R., & Soeherman, B. (2019). *The Economic, Moral and Spiritual Accountability at Kamaran Villa Business and It's Relevance in a Suluk Linglung Sunan Kalijaga*. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/11815>
- Nadir, R., Tawakkal, T., M, H., & Pratiwi, D. E. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Panti Asuhan Rabbani di Maros. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 74–83. <https://doi.org/10.31963/akunsika.v3i2.3552>
- Nasirwan, M. M. R. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko Di Kota Beureunuen). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.180>
- Nurdiwaty, D., & Widiawati, H. S. (2022). Memotret Penerapan Akuntansi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak Syariah Nomor 105 Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.33795/jaeb.v11i1.150>
- Setiawati, B., & Hafni, D. A. (2023). Implementasi ISAK 35 Pada Laporan Keuangan Panti Asuhan. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 101. <https://doi.org/10.24853/jago.3.2.101-114>

Siskawati, E., Ferdawati, F., & Surya, F. (2016). Pemaknaan Akuntabilitas Masjid: Bagaimana Masjid Dan Masyarakat Saling Memakmurkan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7006>